COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA PERANCAK DI KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI

I Ketut Andika Wedananta. M
NPP. 33.0617
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: nyoman165@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Asep Hendra, S.E., M.M.
Email: asephendra@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Tourism development in Bali continues to show disparities between South Bali and other regions, particularly Jembrana Regency. One benchmark is visits to Perancak Tourism Village, which have fluctuated and even declined significantly by 55.46% in 2023-2024.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze government collaboration in the development of Perancak Tourism Village.* ***Method:*** *The research method used in this study is descriptive qualitative with an inductive approach. Data collection techniques include interviews and documentation, with data analysis using data reduction, information presentation, and conclusion drawing techniques according to Collaborative Governance Theory from Emerson (2012).* ***Results:*** *The research results show collaborative governance in the development of Perancak Tourism Village has been implemented, but the implementation is not optimal because there are still several indicators that experience obstacles, namely indicators of mobilizing shared principles and the capacity to carry out joint actions so that it still has an impact on fluctuations in the number of tourist visits to Perancak Tourism Village.* ***Conclusion:*** *Therefore, researchers provide suggestions in the form of a special institution as an integrated tourism manager, establishing strategic partnerships with universities and the tourism industry, and regular monitoring and evaluation by the government*
Keywords: collaborative governance, development of tourist village, tourist village

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perkembangan pariwisata di Bali masih menunjukkan ketimpangan antara Bali Selatan dengan wilayah lain khususnya Kabupaten Jembrana. Salah satu tolak ukurnya adalah kunjungan ke Desa Wisata Perancak yang mengalami fluktuasi bahkan penurunan secara signifikan sebesar 55,46% di tahun 2023-2024. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi pemerintah dalam pengembangan Desa Wisata Perancak**. Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian informasi dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori *Collaborative Governance* dari Emerson (2012). **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Perancak sudah terlaksana, tetapi pelaksanaannya belum

optimal karena masih terdapat beberapa indikator yang mengalami hambatan, yakni indikator penggerakan prinsip bersama dan kapasitas melakukan tindakan bersama sehingga masih berdampak pada fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Perancak. **Kesimpulan:** Oleh karena itu, peneliti memberikan saran berupa lembaga khusus sebagai pengelola pariwisata secara terpadu, menjalin kemitraan strategis dengan perguruan tinggi dan industri pariwisata. serta monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pemerintah
Kata Kunci: *collaborative governance*, desa wisata, pengembangan desa wisata

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pulau Bali merupakan tujuan wisata utama di Indonesia yang sangat dikenal hingga mancanegara. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjamin seluruh wilayahnya mengalami perkembangan pariwisata yang seimbang. Wesnawa (2017) menunjukkan bahwa potensi yang terdapat dalam komunitas pedesaan belum dimanfaatkan sepenuhnya dan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mengelola potensi serta sumber daya yang tersedia untuk menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan (Jitmaneeroj, 2026). Keterbatasan kreativitas masyarakat dalam menciptakan kesempatan ekonomi dari sumber daya alam dan budaya serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran mereka sebagai daya tarik wisata di pedesaan menjadi masalah utama yang menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan pariwisata di Bali, khususnya di daerah pedesaan. (Yahya et al., 2024)

Pulau Bali memang tak dapat dipungkiri terkenal dengan pariwisatanya. Berbagai jenis atraksi wisata, yang diklasifikasikan berdasarkan bentuk, karakteristik, pilihan, tujuan, dan lain-lain, tidak hanya tersedia, tetapi juga disusun dalam beragam kategori untuk memenuhi setiap motivasi dari wisatawan (Utama & Wiguna, 2020). Sebagaimana diketahui, Provinsi Bali memberikan berbagai pilihan dan ragam wisata, termasuk wisata etnik, wisata budaya, perjalanan sejarah, ekowisata, aktivitas lingkungan, hiburan, wisata desa, pariwisata kesehatan, perjalanan ziarah, wisata medis, perjalanan spiritual, pariwisata bisnis, kegiatan kebugaran, wisata alam, petualangan, serta agrowisata, sehingga memberikan kemudahan bagi pengunjung yang datang ke Provinsi Bali dalam menentukan kegiatan perjalanan yang mereka pilih. (Asep & Irfan, 2024)

Kabupaten Jembrana adalah wilayah di Provinsi Bali yang terletak di bagian ujung barat dan berfungsi sebagai pintu masuk serta keluar pulau melalui Pelabuhan Gilimanuk. Wilayah ini memberikan pemandangan alam dan pantai yang masih alami, ditambah dengan beragam atraksi seni dan budaya yang dapat menarik perhatian wisatawan. Unsur seni dan budaya khas Kabupaten Jembrana yang seringkali menarik minat wisatawan antara lain *Makepung* (perayaan balapan kerbau), *jegog* (musik gamelan bambu), dan *kendang mebarung* (pertunjukan gendang besar) (Biddle, 2017). Warisan seni dan budaya ini sudah terkenal hingga ke luar negeri serta diakui sebagai bagian dari warisan budaya nasional. Selain seni dan budaya tersebut, kabupaten ini juga memiliki banyak desa wisata yang memiliki potensi signifikan jika mendapat perhatiandan pengembangan yang tepat dari masyarakat serta instansi terkait. Salah satu desa yang menunjukkan potensi besar di bidang pariwisata adalah Desa Perancak. (Setiawan et al., 2025)

Perancak merupakan desa yang berlokasi di pesisir Kabupaten Jembrana dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Desa Perancak dikenal luas karena potensi ekowisata hutan mangrove, pelestarian penyu, warisan budaya masyarakat nelayan, dan wisata

religious khususnya untuk umat Hindu. Desa ini berada di muara Sungai Perancak, memiliki ekosistem pesisir yang unik dan kaya akan sumber daya, yang menjadikannya sebagai lokasi untuk berbagai aktivitas pelestarian lingkungan (Mutmainah dkk., 2025). Keberagaman potensi wisata di Desa Perancak menunjukkan bahwa desa ini mempunyai prospek tinggi untuk menjadi daya tarik wisata favorit di Kabupaten Jembrana (Muluk et al., 2025). Perancak sudah dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara, yang dibuktikan dengan intensnya kunjungan ke Desa Perancak dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dibuktikan berdasarkan data kunjungan wisatawan di Desa Perancak pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1
Data Jumlah Wisatawan di Desa Wisata Perancak

No	Tahun	Jumlah Wisatawan	Target Jumlah Wisatawan	Persentase Pencapaian Target
1	2022	29.677	30.000	98%
2	2023	13.217	35.000	37%
3	2024	9.675	30.000	32,25%

Sumber: *Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, 2025*

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa pengelolaan desa wisata Perancak masih menghadapi berbagai tantangan, yang dibuktikan dengan masih terjadi fluktuasi signifikan dalam jumlah kunjungan. Pada tahun 2022, jumlah wisatawan mencapai 29.677 orang atau 98% dari target, tetapi angka ini menurun drastis pada tahun 2023 menjadi 13.217 kunjungan atau mengalami penurunan sebesar 55,46%. Angka ini hanya menyentuh 37% dari target yang telah direncanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana sebesar 35.000 kunjungan dalam setahun. Penurunan jumlah wisatawan di Desa Perancak dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain kurangnya promosi destinasi, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta kurangnya kolaborasi antar pihak baik masyarakat, pemerintah, atau pihak ketiga, sehingga daya tarik kawasan ini belum mampu bersaing dengan destinasi lain di Bali. Adapun yang menjadi penekanan dalam penelitian ini adalah bagaimana kolaborasi antar pihak yang sudah terjadi dalam pengembangan pariwisata di Desa Perancak.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah masih terjadi fluktuasi signifikan dalam jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Perancak sehingga peneliti ingin menganalisis bagaimana *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Perancak. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat kita lihat bahwa fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana terjadinya kolaborasi pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam upaya pengembangan pariwisata khususnya di Desa Perancak. Beberapa penelitian menyatakan bahwa kolaborasi pemerintah merupakan hal yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap kemajuan dan pengembangan pariwisata. Penelitian dari Tunjungsari dkk. (2024) juga menyatakan kolaborasi antar pemangku kepentingan (*stakeholder cooperation*) menjadi faktor penting agar destinasi pariwisata dapat bertahan di tengah tantangan. Ketika koordinasi kurang, misalnya ketika program pemerintah tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat atau ketika promosi sektor swasta tidak selaras dengan kebijakan desa, upaya pengembangan destinasi menjadi tidak terarah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pengelolaan objek wisata, keterbatasan dalam penyediaan fasilitas, dan lemahnya promosi, yang pada akhirnya

mengakibatkan berkurangnya minat wisatawan. Penelitian dari Emerson dkk. (2012) tentang teori tata kelola kolaboratifnya, juga menekankan bahwa kolaborasi multipihak sangat penting untuk menghasilkan kebijakan dan praktik yang efektif, terutama di sektor pariwisata yang kompleks dan multipihak karena sektor pariwisata yang kompleks ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi lebih luas lagi mencakup aspek sosial-budaya, lingkungan, dan masyarakat.

Pengembangan pariwisata desa yang sukses dan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pemerintah, masyarakat lokal, dan pihak ketiga (misalnya, sektor swasta, akademisi, dan LSM). Penelitian dari Mega Andini & Kuswandi (2022) menyatakan bahwa kolaborasi multipihak merupakan pendorong utama pengembangan pariwisata desa di Indonesia karena mampu memperkuat kapasitas lokal, mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan budaya, serta memperluas jaringan kemitraan yang mendukung keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Lebih lanjut, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menciptakan ruang inovasi berbasis kearifan lokal dan memastikan kebijakan selaras dengan kebutuhan dan potensi desa wisata. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, menyediakan regulasi, pendanaan, dan infrastruktur pendukung, sementara masyarakat menjadi aktor utama dalam mengelola, melestarikan, dan mempromosikan objek wisata di desa mereka. Sementara itu, pihak ketiga, seperti sektor swasta dan akademisi, berkontribusi melalui dukungan investasi, bantuan teknis, promosi digital, dan pelatihan sumber daya manusia. Dengan keterlibatan semua pihak secara proporsional, pembangunan desa wisata dapat bergerak menuju pembangunan pariwisata berkelanjutan, yang berorientasi tidak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi termasuk pelestarian lingkungan dan kebudayaan (Holman Fasa dkk., 2022). Penelitian terbaru oleh Imtiyaza dkk. (2024) juga menegaskan bahwa penerapan prinsip tata kelola kolaboratif dalam pengembangan desa wisata dapat memperkuat koordinasi antarlembaga, mempercepat inovasi, dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga merupakan fondasi utama bagi keberhasilan pengembangan Desa Wisata Perancak sebagai destinasi unggulan, berdaya saing, dan berkelanjutan. (Handayani et al., 2023)

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana kolaborasi pemerintah dalam pengembangan Desa Wisata Perancak di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali untuk menjadi dasar bagi pemerintah dan pihak terkait dalam meningkatkan kolaborasi sehingga menjadi lebih optimal dan berdampak pada konsistensi kunjungan wisatawan ke Desa Perancak. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Jembrana, Pemerintah Desa Perancak, serta masyarakat dan pengelola objek wisata akan kesulitan dalam memahami apa penyebab fluktuasi jumlah wisatawan yang terjadi di Desa Perancak, sehingga pengembangan pariwisata khususnya di Desa Perancak menjadi tidak optimal.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dirancang untuk menyajikan temuan-temuan dari tulisan-tulisan terdahulu yang telah diselesaikan oleh peneliti dan disajikan dengan cara yang mencakup

argumentasi. Lebih jauh lagi, hasil-hasil tulisan yang disajikan memiliki hubungan yang signifikan dengan tema tulisan yang dipilih oleh peneliti. Hariyoko membahas mengenai dampak dari kolaborasi dalam pengembangan obyek wisata di Surabaya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan teori Ansell & Gash (2008) (Hariyoko, 2023). Rasyid & Darumurti mengkaji peran masing-masing *stakeholders* dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika serta berfokus pada dasar hukum terkait tumpeng tindih lahan dengan masyarakat di sekitar menggunakan teori *collaborative* dari Ansell & Gash (2008) dan Emerson (2012) (Rasyid & Darumurti, 2022). Putri menganalisis mengenai implementasi kolaborasi pemerintah dalam pengembangan Desa Wisata Pinge di Kabupaten Tabanan, Bali, menggunakan metode kualitatif deskriptif serta teori pengukuran keberhasilan tata kelola kolaboratif menurut Deseve dalam Sudarmo (2011) (Putri et al., 2024). Penelitian dari Mutiara menjelaskan mengenai seberapa jauh proses kolaborasi yang terjadi dalam pengembangan Desa Wisata Matano menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teori proses kolaborasi menurut Daniel Seigler (2011) (Mutiara, 2024). Penelitian dari Putra dkk. Mengkaji secara mendalam mengenai kolaborasi pemerintahan dalam pengembangan Objek Wisata di Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis serta faktor-faktor penghambatnya menggunakan metode kualitatif deskriptif dan teori *collaborative* Emerson (2012) (Putra et al., 2022). Adapun, Aris meneliti tentang proses kolaborasi dalam rangka pengembangan pariwisata di Pesisir Pantai Topejawa, Kabupaten Takalar menggunakan metode kualitatif dan teori *collaborative* dari Emerson (2012) (Aris, 2024).

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Peneliti berfokus pada pengembangan Desa Wisata Perancak melalui *collaborative governance* sebagai upaya untuk menganalisis bagaimana kolaborasi antarpihak dapat terjalin yang diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan angka wisatawan yang masih fluktuatif di Desa Wisata Perancak pada beberapa tahun terakhir menggunakan teori Emerson (2012) yang terdiri dari tiga dimensi utama.

Kebaruan penelitian jika dibandingkan dengan penelitian Hariyoko (2023) terdapat pada teori yang digunakan dan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan teori Emerson (2012) sedangkan Hariyoko (2023) menggunakan teori Ansell & Gash (2008). Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada analisis kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Perancak, sedangkan Hariyoko (2023) berfokus pada sejauh mana dampak pengembangan obyek wisata yang telah dilakukan oleh Pemkot Surabaya berdasarkan kolaborasi pemerintahan.

Selanjutnya, penelitian dari Rasyid & Darumurti (2022) berfokus pada peran tiap pihak dalam kolaborasi dan menggunakan dua pisau analisis yakni teori Emerson (2012) dan Ansell & Gash (2008). Penelitian ini berfokus pada bagaimana kolaborasi antarpihak dalam pengembangan desa wisata Perancak. Selanjutnya, Putri dkk. (2024) memfokuskan pada implementasi *collaborative governance* menggunakan teori pengukuran keberhasilan tata kelola kolaboratif dari Deseve dalam Sudarmo (2011) dan memiliki perbedaan signifikan terhadap penelitian oleh peneliti yang fokus pada bagaimana terjadinya kolaborasi menggunakan teori Emerson (2012). Selanjutnya, Mutiara (2024) berfokus pada seberapa jauh terjadinya proses kolaborasi dengan teori proses kolaborasi oleh Daniel Seigler (2011). Ini

sangat berbeda dengan peneliti yang hanya menganalisis bagaimana terjadinya kolaborasi dalam proses pengembangan desa wisata menggunakan teori Emerson (2012).

Selanjutnya, Aris (2024) memiliki kesamaan pada tujuan dan teori yang digunakan oleh peneliti yang dimana sama-sama menganalisis bagaimana proses kolaborasi dalam pengembangan pariwisata dengan teori Emerson (2012). Terakhir, Putra dkk. (2022) juga memiliki kesamaan dalam bagian fokus penelitian dan teori yang digunakan, tetapi memiliki perbedaan dalam dimensi yang digunakan, yakni Putra dkk. (2024) menggunakan tiga dimensi utama yakni Penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama, dan kapasitas untuk melakukan aksi bersama, sedangkan peneliti menggunakan tiga dimensi utama yakni dinamika kolaborasi, tindakan dalam kolaborasi, serta dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kolaborasi pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Perancak, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pendekatan *postpositivisme* serta menggunakan logika pemikiran induktif dalam penelitian ini. Desain penelitian ini dipandang lebih sesuai dalam menyajikan gambaran *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Perancak, karena sejalan dengan data yang diperoleh di lapangan dan kemudian diolah menjadi hipotesis atau teori (Sugiyono, 2012). Penelitian deskriptif kualitatif memberi kesempatan bagi peneliti untuk terlibat secara langsung dalam proses penelitian, menganalisa, mengamati, mencatat, serta menjelaskan isu-isu yang berhubungan dengan pemerintahan yang cerdas yang sesuai dengan situasi nyata dan alami di lapangan. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan dengan mengumpulkan isu-isu tertentu dalam bentuk data lapangan, untuk memperoleh gambaran umum mengenai masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan model penelitian ini, peneliti dapat menyajikan gambaran mendetail berdasarkan kejadian dan data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Akibatnya, peneliti dapat menarik kesimpulan tentang isu mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Perancak di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali serta hambatan yang muncul selama pelaksanaannya.

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, yakni wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur sehingga lebih leluasa dalam memahami kolaborasi antarpihak dalam pengembangan Desa Wisata Perancak di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Adapun dokumen yang diperlukan adalah peraturan, peta lokasi penelitian, gambar sarana dan prasarana pendukung pengembangan Desa Wisata Perancak, foto kegiatan kolaborasi antarpihak dalam pengembangan Desa Wisata Perancak.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model *Miles and Huberman,* yaitu proses analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Adapun tahap yang pertama adalah Pengumpulan Data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dicatat dalam catatan di lapangan. Data yang sudah diperoleh dari berbagai dokumen berdasarkan

kategorisasi yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yang dikemudian dikembangkan penajaman data pada pencarian data berikutnya. Selanjutnya, tahapan reduksi data yakni penyederhanaan, pemilihan, dan pengelompokan data yang diperoleh dari lapangan untuk memfokuskan pada informasi-informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, tahap Penyajian Data dimana data yang telah direduksi dan diolah disusun dan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, sehingga peneliti dan pembaca dapat melihat pola atau makna dari data tersebut. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan analisis lebih lanjut dan memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Penyajian data sendiri dapat berupa tabel, grafik, matriks, narasi deskriptif serta peta atau sketsa. Kemudian, tahap terakhir yakni penarikan kesimpulan untuk menafsirkan temuan data berdasarkan hasil wawancara atau dokumen. Kesimpulan diambil melalui data yang diperoleh pada awal hingga akhir penelitian, kemudian diverifikasi untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh sehingga simpulan akhir dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, yang dimana Desa Perancak merupakan salah satu dari desa wisata di Jembrana. Penelitian dilaksanakan selama tiga minggu mulai dari tanggal 5 Januari 2026-25 Januari 2026, yang mencakup proses pengumpulan data melalui wawancara dengan informan dan mengalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi partisipasi pemuda secara aktual dan kontekstual sesuai dengan dinamika program yang sedang berjalan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kurangnya proses kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pihak ketiga yang terjadi sehingga berdampak pada fluktuasi jumlah wisatawan di Desa Perancak, khususnya pada tahun 2023-2024 yang turun sebesar 55,46%. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti akan membahas dan menganalisis mulai dari sub-bab ini dengan data yang peneliti dapatkan melalui dua teknik pengumpulan data, yakni wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan dijelaskan menggunakan teori Emerson (2012) yang terdiri dari tiga dimensi yakni Dinamika Kolaborasi, Tindakan-tindakan dalam Kolaborasi, serta Dampak dan Adaptasi Pada Proses Kolaborasi. Ketiga dimensi tersebut diukur menggunakan beberapa indikator yang berkaitan dengan maksud dan tujuan penelitian.

3.1. Dinamika Kolaborasi

3.1.1. Penggerakan Prinsip Bersama

Penggerakan prinsip bersama merupakan fondasi awal dalam proses *collaborative governance* karena menjadi dasar bagi para aktor untuk membangun kesepahaman mengenai tujuan, arah, dan strategi pengembangan Desa Wisata Perancak. Dalam konteks pengembangan pariwisata, berbagai aktor yang terlibat seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, Pemerintah Desa Perancak, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), masyarakat, dan pelaku usaha memiliki kepentingan serta peran yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan proses penyelarasan prinsip agar setiap pihak dapat bergerak menuju tujuan yang sama. Penggerakan prinsip bersama dilakukan melalui berbagai forum koordinasi, seperti rapat koordinasi, musyawarah desa, *Focus Group Discussion* (FGD), seminar, dan pelatihan

kepariwisataan. Kegiatan-kegiatan tersebut berfungsi sebagai wadah untuk menyamakan persepsi mengenai potensi wisata yang dimiliki Desa Perancak, permasalahan yang dihadapi, serta langkah strategis yang perlu dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisata desa. Melalui forum tersebut, para aktor diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasan, aspirasi, dan pandangan terkait pengembangan pariwisata sehingga tercipta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah pembangunan desa wisata.

Meskipun demikian, proses penggerakan prinsip bersama belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan antaraktor yang menyebabkan penyatuan prinsip belum terlaksana secara maksimal. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam beberapa forum masih relatif rendah sehingga tidak semua aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam proses perencanaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyamaan prinsip masih memerlukan upaya yang lebih intensif melalui peningkatan komunikasi, keterlibatan masyarakat, dan penguatan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur.

3.1.2. Motivasi Bersama

Motivasi bersama merupakan elemen penting dalam *collaborative governance* karena menjadi faktor yang mendorong para aktor untuk terus berpartisipasi dan berkomitmen dalam proses kolaborasi. Motivasi bersama tidak hanya berkaitan dengan keinginan mencapai tujuan yang sama, tetapi juga mencakup tumbuhnya rasa saling percaya, rasa memiliki, komitmen, dan tanggung jawab terhadap keberhasilan pengembangan Desa Wisata Perancak. Dalam pengembangan Desa Wisata Perancak, motivasi bersama dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, Pokdarwis, dan pelaku usaha. Komunikasi tersebut dilaksanakan melalui forum formal maupun informal yang memungkinkan setiap pihak untuk memahami visi dan tujuan pengembangan pariwisata yang ingin dicapai. Keterbukaan dalam penyampaian informasi dan proses pengambilan keputusan turut berperan dalam meningkatkan kepercayaan antaraktor sehingga kolaborasi dapat berjalan lebih harmonis.

Indikator motivasi bersama dalam pengembangan Desa Wisata Perancak dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya hubungan kerja sama yang cukup harmonis antaraktor serta adanya kesamaan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi wisata. Namun demikian, motivasi tersebut perlu terus dipelihara melalui komunikasi yang konsisten, transparansi dalam pengelolaan program, serta pemberian ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat agar komitmen kolaboratif dapat terjaga dalam jangka panjang.

3.1.3. Kapasitas untuk Melakukan Tindakan Bersama

Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama merupakan kemampuan para aktor kolaborasi dalam mengimplementasikan prinsip dan motivasi yang telah dibangun ke dalam tindakan nyata. Dalam teori *collaborative governance*, kapasitas ini mencakup sumber daya manusia, kelembagaan, kepemimpinan, mekanisme koordinasi, serta pembagian peran yang jelas antaraktor. Pada pengembangan Desa Wisata Perancak, kapasitas tindakan bersama terlihat dari adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang relatif jelas antara para aktor. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana berperan sebagai fasilitator dan regulator yang menyediakan dukungan berupa pelatihan, pembinaan, serta promosi wisata. Pemerintah Desa Perancak berperan sebagai koordinator dan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah daerah maupun pihak eksternal. Sementara itu, masyarakat dan Pokdarwis

berperan sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan objek wisata dan penyelenggaraan berbagai kegiatan pariwisata.

Meskipun demikian, kapasitas tindakan bersama masih menghadapi beberapa tantangan. Perbedaan kepentingan antaraktor, keterbatasan sumber daya tertentu, serta masih adanya ego sektoral menjadi hambatan yang dapat mengurangi efektivitas kolaborasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan mekanisme penyelesaian konflik agar kolaborasi dapat berjalan lebih efektif.

3.2. Tindakan-Tindakan dalam Kolaborasi

3.2.1. Tindakan Memfasilitasi

Tindakan memfasilitasi merupakan upaya yang dilakukan oleh para aktor kolaborasi untuk menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya tujuan bersama dalam pengembangan Desa Wisata Perancak. Pada dimensi ini, pemerintah daerah, pemerintah desa, Pokdarwis, masyarakat, dan pihak swasta berupaya menyediakan berbagai dukungan yang diperlukan agar proses pengembangan pariwisata dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Salah satu bentuk tindakan memfasilitasi yang dilakukan adalah penyediaan kebijakan dan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program pengembangan desa wisata. Keberadaan kebijakan tersebut memberikan arah yang jelas bagi para pemangku kepentingan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan melalui penyusunan program kerja yang berorientasi pada pengembangan potensi wisata, pelestarian budaya lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, tindakan memfasilitasi yang dilakukan para aktor telah memberikan dukungan yang cukup signifikan terhadap pengembangan Desa Wisata Perancak. Namun, masih diperlukan peningkatan kualitas fasilitas, pemerataan akses informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih luas.

3.2.2. Tindakan Memajukan Proses Kolaborasi

Tindakan memajukan proses kolaborasi merupakan berbagai langkah yang dilakukan untuk menjaga keberlangsungan kerja sama serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pengembangan desa wisata. Dimensi ini berfokus pada bagaimana para aktor terus berupaya mengembangkan kolaborasi agar tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi mampu menghasilkan tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam pengembangan Desa Wisata Perancak, tindakan memajukan proses kolaborasi terlihat melalui berbagai inovasi dan pengembangan program yang dilakukan secara bersama-sama. Para aktor berupaya memanfaatkan potensi wisata yang dimiliki desa dengan mengembangkan berbagai atraksi wisata berbasis budaya, alam, dan kearifan lokal. Pengembangan tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya tarik wisata sekaligus memperkuat identitas Desa Perancak sebagai destinasi wisata yang memiliki karakteristik khas.

Aspek lain yang menunjukkan adanya tindakan memajukan proses kolaborasi adalah pengembangan jejaring kerja sama dengan berbagai pihak eksternal. Kolaborasi tidak hanya dilakukan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga melibatkan akademisi, komunitas, pelaku usaha, dan pihak swasta yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan sektor

pariwisata. Kerja sama tersebut memungkinkan adanya pertukaran sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman yang dapat memperkuat pengembangan desa wisata.

Dengan demikian, tindakan memajukan proses kolaborasi menunjukkan bahwa para aktor tidak hanya fokus pada pelaksanaan program yang telah direncanakan, tetapi juga terus berinovasi dan melakukan perbaikan guna meningkatkan kualitas pengembangan Desa Wisata Perancak.

3.3. Dampak dan Adaptasi pada Proses Kolaborasi

3.3.1. Dampak dari Proses Kolaborasi

Dampak merupakan hasil yang muncul dari proses *collaborative governance* yang telah dijalankan oleh berbagai aktor dalam pengembangan Desa Wisata Perancak. Dampak tersebut dapat dilihat dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun kelembagaan yang berkembang sebagai konsekuensi dari adanya kerja sama antar pemangku kepentingan. Dari aspek ekonomi, pengembangan desa wisata memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui berbagai kegiatan usaha yang berkaitan dengan sektor pariwisata. Masyarakat dapat terlibat dalam penyediaan jasa wisata, penjualan produk lokal, pengelolaan destinasi wisata, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang mendukung kebutuhan wisatawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat desa. Dampak positif juga terlihat pada aspek budaya. Pengembangan desa wisata mendorong upaya pelestarian budaya lokal karena budaya menjadi salah satu daya tarik utama yang dimiliki Desa Perancak. Berbagai tradisi, kesenian, dan nilai-nilai lokal semakin mendapatkan perhatian untuk dipertahankan dan diperkenalkan kepada wisatawan. Dengan demikian, pengembangan pariwisata tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pelestarian identitas budaya masyarakat setempat.

Meskipun memberikan berbagai dampak positif, pengembangan desa wisata juga menghadapi beberapa tantangan seperti persaingan dengan destinasi wisata lain, perubahan preferensi wisatawan, serta potensi terjadinya degradasi lingkungan apabila pengelolaan tidak dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin muncul.

3.3.2. Adaptasi dari Dampak Kolaborasi

Adaptasi merupakan kemampuan para aktor kolaborasi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi lingkungan, tantangan, dan kebutuhan yang muncul selama proses pengembangan Desa Wisata Perancak. Kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting karena sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Dalam pengembangan Desa Wisata Perancak, adaptasi dilakukan melalui berbagai upaya perbaikan dan inovasi program. Para aktor berusaha menyesuaikan strategi pengembangan dengan kebutuhan wisatawan yang terus berubah. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan atraksi wisata yang lebih menarik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat promosi berbasis teknologi digital. Adaptasi juga terlihat dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat diberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan industri pariwisata sehingga mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wisatawan.

Selain itu, adaptasi juga dilakukan dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian budaya. Para aktor menyadari bahwa keberlanjutan desa wisata sangat bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan potensi wisata dengan pelestarian sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal agar tetap menjadi identitas utama Desa Wisata Perancak.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Perancak telah terlaksana, namun belum berjalan secara optimal karena masih terdapat hambatan pada dimensi penggerakan prinsip bersama (principled engagement) dan kapasitas melakukan tindakan bersama (capacity for joint action). Kondisi tersebut menyebabkan kolaborasi yang terbangun antara pemerintah, masyarakat, dan pihak ketiga belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putra, As'ari, dan Adianto (2022) yang menemukan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan objek wisata di Rupat Utara telah berjalan melalui dimensi principled engagement, shared motivation, dan capacity for joint action, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *collaborative governance* dalam sektor pariwisata sangat ditentukan oleh kapasitas aktor yang terlibat serta kualitas koordinasi yang dibangun antar pihak. Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Aris (2024) yang menyatakan bahwa pelibatan berbagai pihak dalam pengembangan destinasi wisata telah berlangsung dengan baik, tetapi komunikasi dan sosialisasi antaraktor masih belum optimal. Dalam konteks Desa Wisata Perancak, komunikasi dan koordinasi memang telah dilakukan melalui berbagai forum diskusi, musyawarah desa, dan program pemerintah daerah. Akan tetapi, kolaborasi tersebut belum sepenuhnya menghasilkan tindakan kolektif yang terintegrasi sehingga berbagai program pengembangan wisata masih berjalan secara parsial. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memperkuat argumentasi Aris (2024) bahwa keberadaan aktor kolaborasi saja tidak cukup, melainkan harus diikuti dengan komunikasi yang intensif dan pembagian peran yang jelas agar tujuan pengembangan pariwisata dapat tercapai secara optimal.

Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa faktor pendukung *collaborative governance* di Desa Wisata Perancak meliputi komitmen pemerintah daerah, keberadaan regulasi pendukung, partisipasi masyarakat, serta potensi wisata yang beragam, sedangkan faktor penghambatnya meliputi keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya promosi wisata, keterbatasan anggaran, dan belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Hariyoko (2023) yang menyatakan bahwa pengembangan objek wisata Hutan Bambu Keputih masih menghadapi keterbatasan pendanaan pemerintah untuk pembangunan fasilitas pendukung. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Putri dan Purnamaningsih (2024) yang menemukan adanya keterbatasan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia dalam pengembangan Desa Wisata Pinge. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kapasitas sumber daya masih menjadi tantangan umum dalam penerapan *collaborative governance* pada sektor pariwisata di berbagai daerah di Indonesia.

Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan temuan Rasyid dan Darumurti (2022) mengenai pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran masing-masing stakeholder telah teridentifikasi secara jelas dengan pembagian tugas yang relatif terstruktur antara pemerintah, BUMN, masyarakat, dan sektor swasta. Sebaliknya, dalam pengembangan Desa Wisata Perancak, pembagian peran antaraktor belum sepenuhnya terlembagakan dalam suatu mekanisme pengelolaan yang terpadu sehingga masih ditemukan tumpang tindih peran dan lemahnya koordinasi program. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh karakteristik objek penelitian yang berbeda, di mana KEK Mandalika merupakan kawasan strategis nasional yang memiliki dukungan kelembagaan, investasi, dan pendanaan yang lebih kuat dibandingkan pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat seperti Desa Perancak. Temuan penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Mutiara (2024) yang menemukan bahwa masyarakat Desa Wisata Matano telah terlibat secara aktif dalam berbagai tahapan kolaborasi, mulai dari produksi barang komersial, mobilisasi sumber daya, hingga pengambilan keputusan melalui musyawarah. Pada Desa Wisata Perancak, partisipasi masyarakat memang telah berlangsung melalui kelompok sadar wisata dan komunitas lokal, namun tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan promosi destinasi masih belum merata. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam *collaborative governance* sangat dipengaruhi oleh kapasitas sosial masyarakat, kondisi kelembagaan lokal, serta tingkat kesadaran wisata yang berkembang pada masing-masing wilayah.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukan *collaborative governance* dalam pengembangan Desa Wisata Perancak sudah terlaksana, tetapi pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat beberapa indikator yang mengalami hambatan, yakni indikator penggerakan prinsip bersama dan kapasitas melakukan tindakan bersama sehingga masih berdampak pada fluktuasi jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Perancak. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran berupa lembaga khusus sebagai pengelola pariwisata secara terpadu, menjalin kemitraan strategis dengan perguruan tinggi dan industri pariwisata. serta monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pemerintah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu desa saja sebagai objek penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih kurangnya temuan pada penelitian. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan *collaborative governance* pada pengembangan Desa Wisata Perancak sehingga ditemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih terutama peneliti tujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana beserta jajaran, Kepala Desa Perancak beserta jajaran, serta masyarakat Desa Perancak yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Biddle, J.C. (2017). Improving the Effectiveness of *Collaborative Governance* Regimes: Lessons from Watershed Partnerships. *Journal of Water Resources Planning and Management*, *143*(9), 4017048. https://doi.org/10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000802

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative Framework for *Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory*, *22*(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Handayani, N., Risyanti, R., & Simangungsong, F. (2023). *Collaborative Governance* in Poverty Reduction in Bangkalan Regency , East Java Province. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, *13*(1), 66–77. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3329

Hariyoko, Y. (2023). *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA HUTAN BAMBU KEPUTIH DI KOTA SURABAYA. *REFORMASI*, *13*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.3876

Hendra, A., Setiawan, I., Handayani, I. (2024). *Collaborative governance: Suatu studi pengelolaan sampah dalam mewujudkan zero waste zero emition di Kota Malang Provinsi Jawa Timur*. CV. Rtujuh Media Printing.

Imtiyaza, H., Sunu Astuti, R., & Kismartini. (2024). *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Desa Wisata Kaliwlingi di Kabupaten Brebes. *Journal of Public Policy and Management Review*, *13*, 259–278. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/47321

Jama, A., Yulianti, Y., Prihatmadji, W., Caniago, A., & Izzah, N. (2024). The Impact of Tourism Infrastructure and Marketing Strategies on Tourist Arrivals and Local Economic Growth in Bali. *The Es Economics and Entrepreneurship*, *3*, 12–24. https://doi.org/10.58812/esee.v3i01.319

Jitmaneeroj, B. (2026). Tourism development systems: A diagnostic framework. In *Annals of Tourism Research Empirical Insights* (Vol. 7, Issue 1). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.annale.2026.100208

Mukti, A. (2025). Dinamika Pengembangan Desa Wisata di Indonesia: Analisis Sistematik tentang Pendorong, Tantangan, dan Dampak. *Jurnal Pembangunan Nagari*, *10*(1), 53–63. https://ejournal.sumbarprov.go.id/index.php/jpn/article/view/529

Muluk, M. R. K., Novita, A. A., & Wiswayana, W. M. (2025). Initiating the Thematic Village Concept as an Effort to Improve Sustainable City Governance in Malang: A *Collaborative Governance* Regime Approach. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, *20*(5), 2139–2146. https://doi.org/10.18280/ijsdp.200529

Mutmainah, I., Yulia, I. A., Setiawan, F. A., Setiawan, A. S., Nurhayati, I., Rainanto, B. H., Harini, S., & Endri, E. (2025). Analysis of Factors Influencing Digital Transformation of Tourism Villages: Evidence from Bogor, Indonesia. *Tourism and Hospitality*, *6*(2), 1–23. https://doi.org/10.3390/tourhosp6020057

Putra, A., As'ari, H., & Adianto, A. (2022). *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Rupat Utara Kabupaten Bengkalis. *Journal Publicuho*.

https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/54
Putri, N., Purnamaningsih, P. E., & ... (2024). *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Desa Wisata Pinge Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *... and Investment Review*. http://lgdpublishing.org/index.php/birev/article/view/92
Rasyid, K., & Darumurti, A. (2022). *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Obyek Wisata Bahari Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2021. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, *3*(2). https://doi.org/10.18196/jpk.v3i2.13476
Satiti, A., & Udin, U. (2025). The Impact of Digital Transformation on the Development of the Tourism Industry: Bibliometric Analysis. *International Research Journal of Multidisciplinary Scope*, *6*(1), 603–616. https://doi.org/10.47857/irjms.2025.v06i01.02510
Setiawan, I., Hendra, A., Nooraini, A., Lukman, S., & Johannes, A. W. (2025). *Collaborative Governance* in Realizing Sombere and Smart City in Makassar City, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *1475*(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/1475/1/012020
Setiawan, I., Nawawi, N., Tjenreng, B.Z., Sururama, R., & Kusmana, D. (2025). VILLAGE DEVELOPMENT MODEL OF GROWTH CENTER IN BORDER DISTRICT IN SANGGAU REGENCY WEST KALIMANTAN PROVINCE. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *51*(1), 59–73. https://doi.org/10.33701/jipwp.v51i1.5262
Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, CV.
Tunjungsari, H. K., Lim, A., Siswanto, H. P., Yukianti, C. R., & Buana, S. A. M. (2024). *Identification of Factors Forming Resilience in the Tourism Industry in Indonesia* (Vol. 2023, Issue Icebm 2023). Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-508-9_24
Yahya, A. S., Kusmana, D., Ismunarta, & Sururama, R. (2024). *Collaborative Governance* dalam Penanganan Kemacetan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Media Birokrasi*, *6*(1), 54–84. https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article/view/4151/1873